

**MODEL *GARBAGE CAN* DAN DANA TALANGAN HAJI
(STUDI KRITIK KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI)**



Oleh:

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid

NIM: 1620011039

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

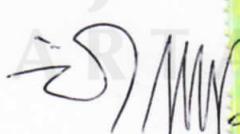
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, S.Sos**
NIM : 1620011039
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta. 30 Oktober 2018

Saya yang menyatakan




Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, S.Sos

NIM : 1620011039

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, S.Sos**

NIM : 1620011039

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

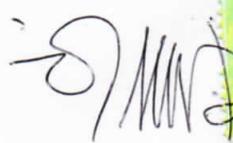
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta. 30 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, S.Sos

NIM : 1620011039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : MODEL *GARBAGE CANDAN* DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Nama : Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid
NIM : 1620011039
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 26 November 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Yogyakarta, 28 November 2018

Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Model *Garbage Can* dan Dana Talangan Haji (Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)
Nama : Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid,S.Sos
NIM : 1620011039
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 26 November 2018

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

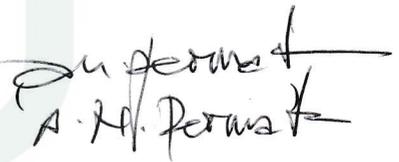
Ketua : Ro'fah, BSW.,M.A.,Ph.D

Penguji : Najib Khailani., S.Fil.I.,M.A.,Ph.D

Pembimbing/Penguji : Dr.phil Ahmad Norma Permata, M.A



(an. Najib Khailani, PhD)



A. H. Permata

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 November 2018

Waktu : 14.00 s.d 15.00

Hasil/Nilai : 87 / B+

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**MODEL *GARBAGE CAN* DAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KRITIK
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, S.Sos

NIM : 1620011039

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

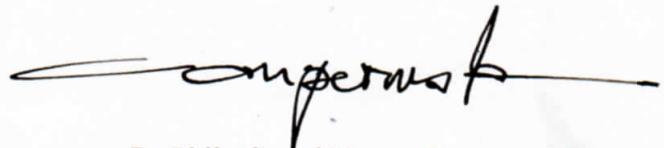
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A)

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, 12 November 2018

Pembimbing



Dr Phil Ahmad Norma Permata, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

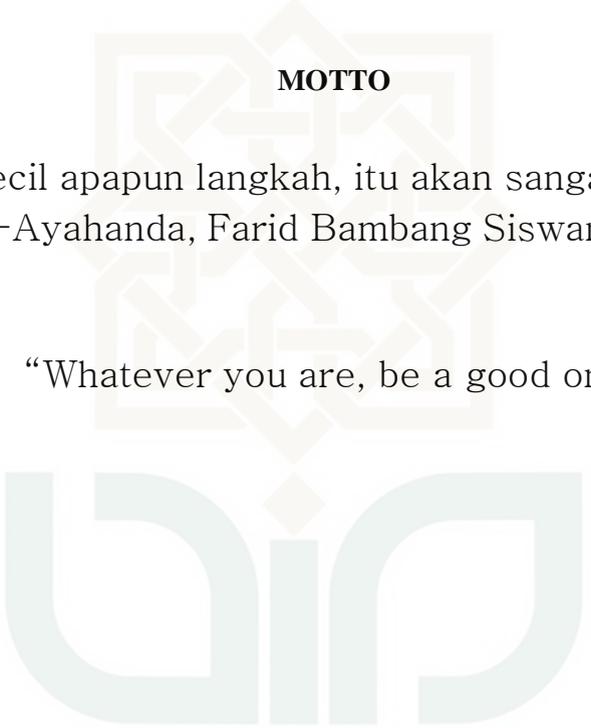
- ❖ Ayah Farid Bambang Siswantoro & Ibu Mahmudiah Firdiani
Nurnahar tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas, dan selalu menyelipkan do'a untukku disetiap sujudnya. Terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini
- ❖ Kakakku tercinta, Frida Zuhara dan Budhi Artha, yang selalu memberikan motivasi dan do'a. Tak lupa untuk Hanif.
Terimakasih atas dukungannya.
- ❖ Untuk Nuzulia, Roni, Yusuf, Abshar, Anif, Umi, Sulkifili dan lainnya di almamater Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

“Sekecil apapun langkah, itu akan sangat berarti”

–Ayahanda, Farid Bambang Siswantoro

“Whatever you are, be a good one”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji syukur yang tiada tara penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya, sehingga tesis berjudul **GARBAGE CAN DAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KRITIK KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI)** ini dapat terselesaikan dengan baik dan senantiasa diberi petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikannya. Sholawat berbingkai salam selalu turchah limpahkan kepada Nabi Muhammad. SAW berikut keluarga dan para sahabatnya yang selalu menjadi tauladan yang baik bagi umatnya. Dan selalu mengiringi perjalanan penulis.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materi. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Suhadi Cholil, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Phil Ahmad Norma Permata, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Keluarga besar tercinta Ayah, Ibu, Hanif, mbak Frida dan Mas Budi .Terima kasih atas senyum semangat yang kalian berikan.

5. Bapak - Bapak pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah membantu dalam proses pembuatan tesis ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya, atas segala keterbatasan ilmu sehingga skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini dan penelitian-penelitian semacam ini dimasa-masa yang akan datang.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Penulis

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid
NIM. 1620011039

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid 1620011039. Tesis: *GARBAGE CAN* DAN DANA TALANGAN HAJI (STUDI KRITIK KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI). Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies. Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dana Talangan Haji merupakan merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*. Dasar Pemerintah mengeluarkan produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Penelitian ini menemukan bahwa metode *garbage can* yang digunakan pun hanya menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di permukaan, tidak menyelesaikan berbagai masalah yang lebih kompleks lainnya. Diantaranya adalah masalah animo haji yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas penunjang haji; pemondokan, catering, pengurusan paspor maupun visa yang seringkali terhambat oleh buruknya birokrasi, pemisahan operator maupun regulator dalam pelaksanaan haji dan semacamnya. Secara keseluruhan proses penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perubahan yang signifikan.

Kata Kunci : *Garbage Can*, Dana Talangan Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Kerangka Teoritis.....	6
1. Model Garbage Can dalam Memutuskan Konsep Kebijakan Dana Talangan Haji.....	6
2. Pendekatan Peran serta Warga Negara	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II BIROKRASI AGAMA DI INDONESIA

.....	17
A. Periodisasi Berdirinya Kementerian Agama	17
1. Masa Jepang	17
2. Masa Kemerdekaan	20
B. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama	22
C. Kepemimpinan Awal Kementerian Agama	25
1. Kepemimpinan HM Rasjidi, B.A.	25
2. Kepemimpinan Prof K.H Fathurrahman Kafrawi.....	28
3. Kepemimpinan K.H Masjkur.....	31
4. Kepemimpinan Teuku Muhammad Hatta.....	33
5. Kepemimpinan K.H.A Wahid Hasyim.....	35
D. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	38
E. Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia.....	40
F. Metode Istisbat Hukum Majelis Ulama Indonesia.....	44
G. Hubungan Antara Kementerian Agama, MUI dan Ormas Islam	49
H. Fatwa MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia	54
BAB III PERMASALAHAN DANA TALANGAN HAJI.....	57
A. Pengertian Dana Talangan Haji	57
B. Dasar Hukum Dana Talangan Haji.....	60
1. Fatwa Dewan Syariah MUI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Syariah.....	60
2. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji...61	
C. Titik Lemah Penyelenggaraan Ibadah Haji	62
1. Kementerian Agama Masih Sebagai Regulator, Operator dan Evaluator.....	62
2. Kuota Haji Tidak Sebanding Dengan Animo Masyarakat.....	64
3. Pengelolaan Dana Abadi Ummat yang Kurang Transparan.....	68
D. Pengelola Keuangan Haji Menjadi Kewenangan Badan Tersendiri.....	71
E. Pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah	74

BAB IV	DANA TALANGAN HAJI DALAM ANALISIS	
	GARBAGE CAN.....	79
	A. Ibadah Haji Sebagai Pelayanan Publik Negara	79
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik ..	85
	C. <i>Garbage Can</i> Sebagai Model Pengambilan Keputusan.....	89
	D. Kesimpulan.....	93
BAB V	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lingkaran Kebijakan (<i>Policy Cycle</i>)	8
Gambar 2	Posisi MUI dalam Birokrasi Agama di Indonesia	50
Gambar 3	Pola Koordinasi Kementerian Agama, MUI dan Ormas Islam	50
Gambar 4	Mekanisme Transaksi	58
Gambar 5	Syarat Permohonan Pembiayaan	60
Gambar 6	Mutu Penyelenggaraan Haji Dinilai Turun Republika 7 Desember 2011	64
Gambar 7	Struktur Badan Pengelola (BP) DAU	69
Gambar 8	Vis, Misi dan Strategi BPKH	74

Gambar 9	Pembiayaan Dana Talangan Haji BRI Syariah	
	77
Gambar 10	Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan	
	88
Gambar 11	Keterkaitan Variabel yang Dapat Mempengaruhi Kebijakan Publik	
	89
Gambar 12	Alur Pengambilan Keputusan <i>Garbage Can</i>	
	92
Gambar 13	Proses Pengambilan Keputusan Menurut <i>Garbage Can</i>	
	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Analisis Kebijakan	8
Tabel 2	Bank Penerima Setoran	62
Tabel 3	Jumlah Jamaah Haji DIY Berdasarkan Wilayah Tahun 2017	64
Tabel 4	Jumlah Jamaah Haji DIY Tahun 2014 - 2016	65
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Jamaah Haji DIY Tahun 2017	66
Tabel 6	Daftar Tunggu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu proses peribadahan dalam agama Islam, haji memiliki corak histori yang sangat unik. Ibadah ini merujuk pada serangkaian peristiwa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meskipun demikian, haji bukanlah suatu perulangan dari apa yang telah dialami para nabi itu. Sebab, sejarah merupakan suatu peristiwa yang berlangsung hanya satu kali saja. Maka, perulangan haji yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan umatnya sampai hari ini, bukan lagi dianggap sebagai peristiwa sejarah, melainkan sebagai ibadah, walaupun aspek historis masih terdapat di dalamnya.

Dalam unsur sosial misalnya, terdapat sokongan masyarakat yang mempermudah proses pelaksanaan haji, seperti acara pengajian, ritual sebelum berangkat, dan doa bersama. Hukum ibadah haji dan umrah menurut pendapat M. Quraish Shihab¹ wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali dalam seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan. Menurut jumhur ulama, umroh pun demikian. Meskipun ada di antara mereka yang berpendapat hukumnya sunnah. Pengertian umrah dalam buku *Bimbingan Manasik Haji* ialah² berkunjung ke Baitullah, melakukan thawaf, sa'i dan bercukur demi mengharap ridha Allah.

Berbagai proses pelaksanaan haji ini diyakini sebagai serangkaian acara yang mampu mengintegrasikan segenap kekuatan dan ketulusan calon jama'ah haji. Lain halnya dalam unsur budaya, terdapat sokongan moral yang berkaitan

¹ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah*. Jakarta: 2012. Lentera Hati, hlm. 217

² Mustafa Bisri. *Bimbingan Ibadah Haji*. Jakarta: 2000, Ditjen Bimas dan Urusan Haji , hlm. 5

dengan penguatan identitas, bagi orang yang telah menunaikan haji memperoleh tempat yang berbeda dari masyarakat lain. Secara kultur, haji menjadi alat transformasi kesadaran yang berpengaruh terhadap relasi sosial-keagamaan di lingkungannya. Bermula dari perdagangan yang berkembang hingga ke negeri Arab, sudah banyak Muslim Nusantara yang melaksanakan haji.

Walaupun proses yang dilalui sangat sulit dan bahkan berhadapan dengan pelbagai macam halangan, sebagaimana umat Islam pada abad XVI tetap bertekad melaksanakan haji melalui media berdagang. Setiap bulan Dzulhijjah tiba perhatian dunia khususnya umat Islam di berbagai belahan bumi akan tertuju pada proses ibadah haji di Mekkah. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istita'ah*; baik secara finansial, fisik, maupun mental dan ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam yang mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat, hal ini terefleksi dalam prosesi Wukuf, Thawaf, Sa'i dan Jamarat yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji.

Di Indonesia menunaikan ibadah haji merupakan dambaan jutaan masyarakat, apalagi menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai pencapaian puncak spiritual seseorang dalam menjalankan agamanya namun juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah lingkungan sosial dan masyarakat. Hal inilah yang mendorong semangat atau *ghirroh* ummat Islam di Indonesia sangatlah tinggi sehingga disetiap penyelenggaraan ibadah haji tiap tahunnya, kontingen jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar dari seluruh Negara, hal ini cukup beralasan mengingat Indonesia menempati negara urutan atas dengan populasi jumlah umat Islam tertinggi di dunia.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah haji,³ bahwa yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan ibadah haji selama ini adalah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan dibantu oleh instansi terkait. Penyelenggaraan ibadah haji haruslah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Namun fakta yang terjadi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya selalu menimbulkan masalah laten yang tak kunjung ditemukan solusi efektifnya sejauh ini.

Problematika yang selalu muncul adalah mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi jamaah haji, pengelolaan dana haji (Dana Abadi Ummat) hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia. Meskipun sistem penyelenggaraan haji telah berkali-kali mengalami perubahan dan penyempurnaan namun hingga saat ini masih terus memunculkan ketidakpuasan. Formula yang tepat dan memenuhi asas utama penyelenggaraan haji yang baik, yaitu aman, nyaman, dan sempurna secara syariah masih terus ditingkatkan. Melalui karya ini penulis mencoba menganalisis kebijakan penyelenggaraan ibadah haji melalui berbagai model pengambilan keputusan .

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia?
2. Apa model pengambilan keputusan yang dipakai oleh pemerintah dalam memutuskan konsep kebijakan Dana Talangan Haji?

³ Lihat Undang – Undang No 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 34 tahun 2009

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang faktor penyebab terjadinya problem penyelenggaraan ibadah haji.
2. Mengetahui model pengambilan keputusan pemerintah selaku aktor kebijakan publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan masukan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan khususnya konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat memberikan informasi serta dapat memberikan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan penyelenggaraan ibadah haji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kinerja bagi penyelenggaraan ibadah haji, dari segi faktor yang menghambat penyelenggaraan ibadah haji agar terjadinya peningkatan mutu pelayanan haji.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran terhadap tesis, karya ilmiah maupun buku, penulis sadar bahwa sudah banyak penelitian terhadap persoalan penyelenggaraan haji. Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang penulis anggap sedikit menggambarkan tentang apa yang penulis paparkan diantaranya:

Tesis dari Vina Zakiyatul Fajriyyah mahasiswi UIN Sunan Ampel 2015
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Pembiayaan Dana Talangan Haji di

Bank BNI Konvensional CAPEM Ngoro Industri Mojokerto. Penelitian ini mengenai pembayaran pembiayaan dana talangan haji di Bank BNI Konvensional Mojokerto, termasuk menyangkut aspek yuridis dan non yuridisnya. Yang berbeda dalam penelitian ini adalah subyek penelitiannya. Untuk penelitian saat ini analisis problematika manajemen haji di Indonesia (dana talangan haji dan monopoli Kementerian Agama).

Jurnal dari Ahmad Nadjib terbit di Jurnal Dialog Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama vol no 42 th. XX Maret 2010. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif*. Tulisan ini tentang kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Dalam penjabarannya, tulisan ini menerangkan bahwa posisi MUI berada dalam sistem infrastruktur politik ketatanegaraan Indonesia.

Jurnal dari Zabaedi dosen di IAIN Bengkulu terbit di Jurnal Manhaj vol 4 Desember 2016 *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)*. Tulisan ini tentang problematika manajemen haji Indonesia dari zaman Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi dan upaya restrukturisasi pengelolaan manajemen tata kelola haji yang modern. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan haji dari sisi idealita dan realita.

Skripsi dari Kartika Rosiyati mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terbit tahun 2010 "*Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem*

Banjaran Bantul.” Tulisan ini tentang pembiayaan dana talangan haji menurut fatwa DSN MUI dan peraturan perundangan lainnya. Dalam tulisan ini yang diangkat pembiayaan dari koperasi simpan pinjam di daerah Banjaran Bantul. Ada berbagai problematika yang diangkat dalam tulisan ini seperti faktor yang menghambat maupun faktor pendukungnya pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji.

F. Kerangka Teoritis

1. Model *Garbage Can* dalam Memutuskan Konsep Kebijakan Dana Talangan Haji

Sebelum berbicara mengenai model pengambilan keputusan *garbage can*, penulis akan mencoba menjabarkan konsep masalah publik, kebijakan publik dan model pengambilan keputusan. Jika mengkaji lebih dalam mengenai penyebab terjadinya masalah publik, awal mula terjadinya masalah publik disebabkan adanya orang atau kelompok tertentu yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.⁴ Dengan demikian, masalah orang ingin berhaji tetapi tidak punya biaya, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan solusi dengan cara dana talangan haji maka hal ini sudah termasuk masalah publik karena masalah tersebut sudah diartikulasikan.

Dalam konteks kebijakan, kebijakan publik merupakan denyut nadi dari proses pemerintahan.⁵ Dan negara adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah. Karena kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan negara, maka kebijakan publik seringkali diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan untuk

⁴ Budi Winarno “*Kebijakan Publik era Globalisasi, Teori Proses dan Studi Kasus Komparatif*”, Yogyakarta, CAPS 2016, hlm 74

⁵ Arief Budiman, “*Teori Negara*”. Jakarta: PT Gramedia Elexkomputindo, 1992, hlm 13

memastikan tujuan-tujuan sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik bisa tercapai.⁶ Oleh karena itu persoalan kebijakan publik dapat diartikan juga sebagai persoalan penggunaan kekuasaan pemerintahan.

Secara generik, terdapat empat jenis kebijakan publik yaitu: *pertama*, kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasi secara tertulis agar dapat berlaku. *Kedua*, kebiasaan umum lembaga publik yang telah disepakati (konvensi). *Ketiga*, pernyataan kebijakan publik yang merupakan pernyataan pejabat publik di depan publik. *Keempat*, perilaku pejabat publik mengenai kebiasaan pejabat dalam kepemimpinannya mempengaruhi lingkungan kebijakannya.⁷

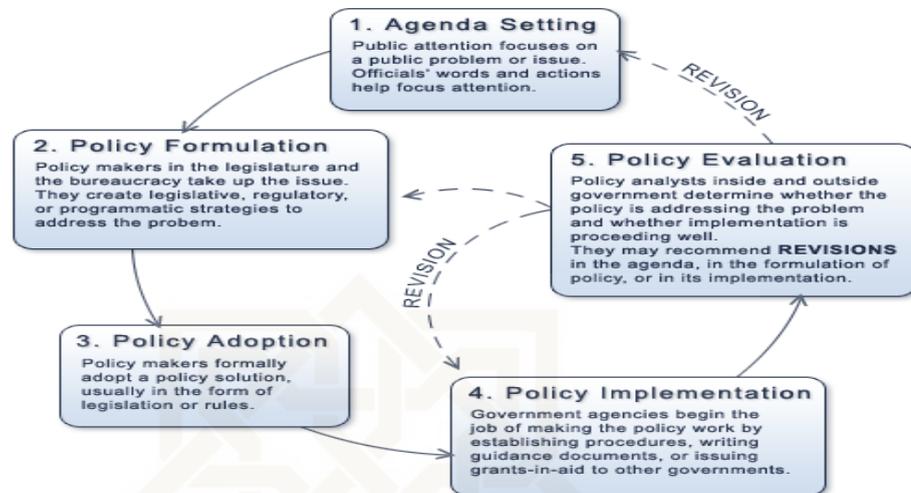
Menurut William Dunn tahapan kebijakan publik meliputi, penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), legitimasi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan penilaian kebijakan (*policy evaluation*).⁸ Tahapan seperti akan berulang kembali apabila dalam suatu tahapan dirasa kurang pas, sehingga proses revisi bisa terjadi dalam setiap tahapan.⁹

⁶ Purwo Santoso, "Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik," Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004, hlm 43

⁷ Rian Nugroho, "Public Policy edisi ke 6" (Jakarta: Elex Media, 2017) hlm 125

⁸ William Dunn, "Pengantar Analisis Kebijakan Publik," cet. Ke-5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003) hlm 24

⁹ http://www.laits.utexas.edu/txp_media/html/bur/features/0303_01/policy.html diakses 25 September 2018



Sumber: 1. Lingkaran Kebijakan (Policy Cycle)

Penyusunan agenda kebijakan dana talangan haji pada mulanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berhaji tetapi tidak mempunyai biaya untuk berangkat. Tetapi pada akhirnya, dana talangan haji ini menjadi *bad policy* (kebijakan yang buruk) dan dihentikan karena berbagai permasalahan yang ada seperti menyebabkan penambahan *waiting list*, *riba*, dan sebagainya. Perlu dicermati, bagaimana model pengambilan keputusan yang digunakan dalam memutuskan dana talangan haji sehingga menjadi sebuah keputusan yang buruk. Dalam diskursus kebijakan, ada beberapa model pengambilan keputusan seperti *rational comprehensive*, *mixed scanning* dan *garbage can*. Berikut akan penulis paparkan perbedaannya :

PENDEKATAN POINT PERBEDAAN	<i>RATIONAL COMPREHENSIVE</i>	<i>MIXED-SCANNING</i>	<i>GARBAGE CAN</i>
Asumsi Ontologis	Setiap permasalahan memiliki solusi obyektif	Setiap permasalahan berada dalam konteks yang spesifik	Tidak ada solusi yang benar-benar obyektif untuk setiap solusi karena

			permasalahan dan pengambilan keputusan selalu terjadi dalam konteks yang spesifik
Sikap terhadap konteks	Hampir sepenuhnya abai terhadap konteks	Memberikan perhatian kepada konteks sembari mengupayakan pengambilan keputusan dalam rasionalitas tekhokratis yang bisa dimaksimalkan	Terlalu hirau dengan konteks, sehingga dalam pengambilan keputusan selalu mengacu pada pengalaman di masa lalu untuk situasi yang dianggap serupa
Logika proses	Tekhnokratis	Politis	Birokratis

Tabel 1 :Perbedaan Analisis Kebijakan

Diantara ketiga model tersebut, model *mixed-scanning* berusaha mengambil jalan keluar dari kedua model lainnya. *Garbage can* melihat proses kebijakan sedikit sekali melibatkan proses yang rasional ilmiah. Proses kebijakan biasanya dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang pernah dilakukan di masa sebelumnya ataupun di tempat lain.¹⁰

Model *rational-comprehensive* sebaliknya mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai keputusan rasional, segala keputusan diambilkan berdasarkan data dan informasi yang ilmiah komprehensif. Model *mixed scanning* mencoba mengambil posisi di antaranya keduanya.¹¹ Model ini berusaha mengakui kenalaran manusia dan melihat proses

¹⁰ *Ibid* hlm 45

¹¹ *Ibid* hlm 46

kebijakan bukan hanya rasional efektif dan efisien, tetapi juga proses rasional politis, yang bisa saja mengakibatkan adanya tawar menawar antar berbagai kalangan maupun aktor yang terlibat.

Jika menggunakan metode *mixed scanning*, keputusan yang diambil akan menjadi lebih terurai, misal upaya penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (karena menjadi acuan dunia) yang dapat berimbas pada turunnya ongkos naik haji, tidak memprivatisasi pelaksanaan haji sehingga dapat menjadikan daya saing yang kompetitif sehingga dapat berakibat meningkatnya mutu pelayanan haji dan upaya lain sebagainya.

Theodore Lowi berpendapat bahwa kebijakan menentukan dinamika politik. Hasil setiap kebijakan mendapat tanggapan khusus dari mereka yang terkena dampak. Dampak oleh kebijakan menentukan perdebatan politik dalam hal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Persepsi hasil kebijakan adalah penting, pembuat kebijakan dalam posisinya mempengaruhi persepsi pada proses kebijakan.¹² Dalam karya ini penulis juga berasumsi bahwa model *garbage can* yang digunakan dalam metode pengambilan keputusan dana talangan haji adalah sebuah kebijakan yang buruk (*bad policy*) yang telah dikeluarkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia.

2. Pendekatan Peran serta Warga Negara

Teori peran serta warga negara ini didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan kei menginginkan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Menurut teori ini, dibutuhkan warga

¹² Frank Fisher, dkk, "*Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*", terj. Imam Baihaqie (Bandung: Nusa Media, 2015) hlm 153-154

negara yang memiliki struktur-struktur kepribadian yang sesuai dengan nilai dan fungsi demokrasi.¹³ Dengan keikutsertaan warga negara dalam masalah masyarakat, maka para warga negara akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perseptif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi.

Setiap warga negara harus memiliki cukup kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah sosial politik, mempunyai sikap kritis yang sehat dan harga diri yang cukup dan yang lebih penting adalah perasaan mampu untuk ikut berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. Di atas segalanya para warga negara harus tertarik dalam hal sosial politik dan menjadi pribadi yang makin bermakna.¹⁴ Sekalipun rakyat biasa digambarkan sebagai kelompok warga negara yang tidak mempunyai informasi sosial politik dan tidak mempunyai keahlian dalam bentuk yang dihasilkan oleh penelitian survei maupun hal akademik lainnya, kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan suatu perbaikan terhadap ketidakacuhan yang tampak.

Dalam hal penelitian ini, sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan ibadah haji, maka pemerintah memberikan kesempatan warga negara untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan yaitu melalui dana talangan haji. Dana talangan haji ini sendiri berasal dari Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dananya berasal dari nasabah itu sendiri.

¹³ Budi Winarno "Kebijakan Publik era Globalisasi:Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif" hlm 54

¹⁴ Louis W Koeng, "An Introduction to Public Policy" Englewood Cliffs, Prentice Hall 1986, hlm 21

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam memaparkan penyebab utama terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena empiris secara holistik (menyeluruh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek Penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian atau yang disebut dengan *key person* yang berarti sumber informasi.¹⁶ Adapun subjek penelitian ini adalah peraturan dari lembaga swasta maupun pemerintah yang berkaitan dengan dana talangan haji.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah jamaah haji yang menggunakan dana talangan haji baik yang sudah berangkat maupun masih menunggu antrian pemberangkatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan menggunakan cara berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk kegiatan untuk menghimpun atau mencari informasi dengan jalan melakukan tanya jawab secara

¹⁵ Tatang M. Arimin, “*Menyusun Rencana Penelitian*”, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm

¹⁶ Ibid hlm 12

langsung bertatap muka dengan informasi yang diperlukan. Teknik wawancara yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur artinya susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.¹⁷ Subjek pendukung yang dapat membantu melengkapi data yang dibutuhkan penulis pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pengurus PDHI Yogyakarta.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal atau *variabel* yang mungkin tidak didapatkan melalui wawancara atau observasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, catatan pengadilan dan sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data rinci mengenai dana talangan haji, fatwa Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Menteri Agama maupun putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

c. Metode analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul melalui beberapa metode yang digunakan, selanjutnya dilakukan analisis data agar data tersebut dapat bermakna. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang

¹⁷ Dedi Mulyana, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2010 hlm 180

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian dideskripsikan dan diuraikan secara objektif dan dipahami serta dipelajari untuk memperoleh kesimpulan yang benar dan logis. Adapun alasan penulis memilih metode penelitian analisis data kualitatif karena penulis merasa bahwa metode penelitian tersebut paling sesuai dan tepat dengan penelitian yang penulis sedang lakukan, mengingat data yang terkumpul dan yang diambil bersifat kualitatif.

d. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu usaha mengecek data kebenaran data informasi yang telah dikumpulkan. Berikut usaha yang dilakukan oleh peneliti:¹⁹

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan sumber di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 4) Membandingkan apa yang dikatakan pada saat penelitian, dengan yang dikatakan saat di luar penelitian.

¹⁸ Ibid halaman. 3

¹⁹ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 330

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan.

Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran birokrasi agama di Indonesia. Dalam bab ini membahas kedudukan Kementerian Agama, MUI, dan Ormas Islam. Pola koordinasi antar ketiganya yang tanpa melibatkan garis komando juga ditampilkan dalam bab ini.

Bab III berisi penjelasan secara detail mengenai dana talangan haji, kuota pertahunnya dan peraturan menteri yang membolehkan dilaksanakannya dana talangan haji serta membahas putusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai dana talangan haji.

Bab IV berisi pemahaman laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data serta analisis data tentang relasi model pengambilan keputusan *garbage can* dengan problematika penyelenggaraan ibadah haji khususnya mengenai dana talangan haji

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab V. Pada bagian ini disebut penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Akhirnya, bagian akhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan terjadi banyak persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Metode *garbage can* yang digunakan pun hanya menyelesaikan berbagai persoalan yang berada di permukaan, tidak menyelesaikan berbagai masalah yang lebih kompleks lainnya. Diantaranya adalah masalah animo haji yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas penunjang haji; pemondokan, katering, pengurusan paspor maupun visa yang seringkali terhambat oleh buruknya birokrasi, pemisahan operator maupun regulator dalam pelaksanaan haji dan semacamnya. Secara keseluruhan, proses penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perubahan yang signifikan, tetapi masih ada berbagai persoalan yang harus segera diselesaikan sebagai upaya pelaksanaan dan implementasi kebijakan pelayanan prima negara kepada warga negara.

Penyelenggaraan haji adalah sebuah pelayanan publik yang bersifat multidimensional lintas sektor dengan pemimpinnya adalah Kementerian Agama. Dari tahun ke tahun, telah terjadi peningkatan mutu pelayanan, dana talangan haji ini merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang pada akhirnya dihentikan karena menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang paling terlihat adalah semakin tambah panjangnya daftar tunggu antrian haji hingga mencapai bertahun-tahun bahkan mencapai puluhan tahun.

B. Saran

Hal yang muncul dari penelitian ini bukanlah akhir dari pembahasan, tetapi adalah sebuah topik yang akan membuka kemungkinan pembahasan lebih lanjut dan lebih luas dari penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Mendeskripsikan mengenai berbagai banyaknya

permasalahan penyelenggaraan ibadah haji akan sangat beragam akan pembahasannya sehingga penulis memiliki keterbatasan untuk eksplorasi secara mendalam.

Penelitian lebih lanjut mengenai topik permasalahan penyelenggaraan ibadah haji akan sangat penting untuk diwujudkan sebagai upaya bahan evaluasi agar pelayanan semakin lebih baik sebagai perwujudan pelayanan prima negara kepada warga negara. Sasaran maupun kritik dari para pembaca sekalian akan sangat dibutuhkan sebagai upaya membuka diskusi pada khazanah pengetahuan yang lebih luas terhadap topik ini dan oleh karena itu penulis mengharapkan penyempurnaan pada tulisan ini untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimin M Tatang, 1986. *“Menyusun Rencana Penelitian”*, (Jakarta: CV Rajawali)
- Arsip Nasional RI, Resolusi 18 Oktober 1925 No. 9
- _____ Resolusi 26 Maret 1831 No. 31
- Atjeh, Aboebakar. *Sedjarah Hidup K.H.A Wahid Hasjim dan Karangannya Tersiar*. Jakarta: Panitia
Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasjim
- Azra Azyumardi & Saiful Umam, 1998. (ed.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI,)
- Benda J Harry, 1980. *“Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang”*, Terj . Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya)
- Bisri Mustafa. *Bimbingan Ibadah haji*. Jakarta: 2000, Ditjen Bimas dan Urusan Haji
- Bruinessen van Martin, 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan)
- Budiman, Arif, 1992. *“Teori Negara”*. Jakarta: PT Gramedia Elexkomputindo
- Data Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY
- Dijk van Kees, 1997. *“Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”*, dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia Dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet (Jakarta: INIS,)
- Djoened Marwati Poesponegoro, 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta, Balai Pustaka)
- Dunn William, 2003. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik,”* cet. Ke-5 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

Effendi Bahtiar, 2011. *“Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia“*, terj Ihsan Ali-Fauzi dan Rudi Harisyah Alam (Jakarta; Democracy Projecy)

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah

_____ No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

_____ No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

Fisher Frank, dkk, 2015. *“Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode”*,
terj. Imam Baihaqie (Bandung: Nusa Media)

Haidar Ali, 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik*
(Jakarta: Gramedia,)

Jannah Miftahul, 2014. *“Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Indonesia”*, (Skripsi, UIN
Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya)

J.G March dan Olsen, J.P,1972. *A Garbage Can model of Organizational Choice*, (Administrative
Science Quarter 17)

Kartodirdjo Sartono, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium
Sampai Imperium Jilid I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Karim Helmi, 1994. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum
Islam*, (Pekanbaru : Susqa Press,), cet ke-1

Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara nomor 58 tahun 2002

_____ nomor 63 tahun 2003

_____ nomor 25 tahun 2004

Koeng W Louis, 1986. *“An Introduction to Public Policy”* Englewood Cliffs, Prentice Hall

Mansur Ahmad Suryanegara, 2012. *Api Sejarah* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama)

- Mudzhar, M. Atho, 1993. *“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”*, (Jakarta: INIS)
- Mufrodi Ali, 2003. *Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis*, disampaikan dalam peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- Muchtar Arifin Zainal, *Mengelola Dana Abadi Ummat Mencegah Korupsi di Sektor Pengelolaan Haji* disampaikan dalam Seminar Sehari Kebijakan Penyelenggaraan Haji oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Yogyakarta 17 Maret 2012
- Mulyana Dedi, 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung; Remaja Rosdakarya,
- Nasikun, 2014. *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta PT Rajagrafindo Persada)
- Noer Deliar, 1994. *“Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945”* Cet VII (Jakarta: LP3ES)
- Nugroho Rian, 2017. *“Public Policy edisi ke 6”* (Jakarta: Elex Media)
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
- Poister Theodore H, 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organization*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Rosiyati Kartika, 2010. *“Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Bantul”* skripsi (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Ricklef M.C 2007, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

Winarno Budi, 2016. *“Kebijakan Publik era Globalisasi, Teori Proses dan Studi Kasus Komparatif”* Yogyakarta CAPS

Zakiyatul Vina Fajriyah. 2016. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank BNI Konvensional CAPEM Ngoro Industri Mojokerto”* Tesis Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Zaini, Achmad, 2011. *K.H Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pesantren Tebuireng

Zuhri, Saifuddin. 1983. *Guruku Orang-orang Pesantren*. Bandung: al-Ma'arif.

JURNAL

Mubarak Jaih & Hasanuddin, 2013. *“Fatwa Tentang Pengurusan Pembiayaan Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”* Jurnal Al-Iqtishad, Vol.5, No.1, hal 24-37

Najib Ainun, 2010. *„Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif”* DIALOG: Jurnal Studi Islam dan Informasi Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama., No 42 Th.

XX

WEBSITE

Anonim, *„Menteri Agama Kembali Ingatkan Dana Talangan Haji oleh Perbankan Dilarang”* dalam <http://news.detik.com/berita/2509359/menag-kembali-ingatkan-dana-talangan-haji-oleh-perbankan-dilarang>

_____, *“Pemerintah Ubah Regulasi Penyelenggaraan Haji dalam* <http://joglosemar.co/2016/04/tahun-pemerintah-ubah-regulasi-penyelenggaraan-haji.html>

_____, „Sistem Pembayaran Ibadah Haji Belum Transparan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt523aeba65def4/sistem-pembayaran-ibadah-haji-belum-transparan>

_____, „Sejarah MUI” dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

_____, „Syarat Pembiayaan Talangan Haji” dalam <http://www.syariahmandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji>

_____, „Dana Haji 11 Triliun Dipindahkan ke Bank Syariah” dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20130418/15/9400/dana-haji-rp11-triliun-dipindahkan-ke-bank-syariah>

_____, „103 Triliun Dana Haji Sudah Dikelola BPKH” dalam <https://kemenag.go.id/berita/read/507086/103-triliun-dana-haji-sudah-dikelola-bpkh>

Devi Sinta Rosita, *“Penyelewengan Dana Abadi Ummat”* dalam [https://www.academia.edu/6691108/Penyelewengan Dana Abadi Umat](https://www.academia.edu/6691108/Penyelewengan_Dana_Abadi_Umat)
www.laits.utexas.edu/txp_media/html/bur/features/0303_01/policy.html

CURRICULUM VITAE (CV)

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid,S.Sos
2. Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Februari 1994
3. Alamat : Gg Ontoseno RT 58 Diro
Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta 55185
4. Nomor Telepon : +62 857 2846 6624
5. Agama : Islam
6. Email : rifaatfarid@gmail.com

II. Pendidikan

1. Sekolah Dasar:
SD Negeri Karanggondang Bantul (2000 – 2006)
2. Sekolah Menengah Pertama:
 - Pondok Modern Darussalam Gontor II Ponorogo (2006)
 - Pondok Modern Darul Qiyam Gontor VI Magelang (2006 – 2009)
 - Menempuh Ujian Nasional di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul (2009)
3. Sekolah Menengah Atas:
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Yogyakarta (2009 – 2012)
4. Perguruan Tinggi :
S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (2012- 2016)
S2 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Sekolah Pascasarjana program studi Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (2016 – 2018)
S2 : Universitas Gadjah Mada (UGM) Sekolah Pascasarjana program studi Ketahanan Nasional (2017-sekarang)

III. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014 - 2015)
2. Fasilitator Pemberdayaan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2016 - sekarang)
3. Divisi Dakwah, Pelatihan, dan Pengembangan Remaja Masjid Al Moeladi Diro Pendowoharjo (2017-sekarang)

4. Divisi Pelayanan Umum Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2017- sekarang)

IV. Pengalaman Kerja

1. Relawan Demokrasi Segmen Agama KPU Kabupaten Bantul (November 2013 - April 2014)
2. Asisten Dosen mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah (Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018)
3. Petugas Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 (Desember 2017 – Februari 2018)
4. Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2019 Kelurahan Pendowoharjo (Maret 2018 - sekarang)

Yogyakarta 28 November 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA